



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MATARAM (STUDI DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU SANDUBAYA)

Nafillah¹, Muhammad Ali¹, Rahmad Hidayat^{1,2}

¹Universitas Muhammadiyah Mataram

²corresponding author: rahmad_dayat22@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan, dimulai dari pemilahan di sumber hingga proses akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya dapat mengurangi volume sampah di Kota Mataram, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPST Sandubaya, serta masyarakat sekitar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TPST Sandubaya telah mampu memberikan kontribusi dalam pengurangan volume sampah dengan adanya program seperti pemilahan sampah, pengolahan kompos, budidaya maggot, hingga pembuatan paving block dari sampah plastik. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini sudah berjalan tetapi belum optimal. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya partisipasi masyarakat yang belum maksimal, masih terjadi kerusakan mesin yang membuat keterbatasan fasilitas saat operasional. Faktor pendukung keberhasilan seperti penggunaan teknologi canggih di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), tersedianya tenaga kerja terlatih meskipun jumlahnya masih belum optimal, serta dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah melalui kebijakan ini perlu terus dioptimalkan seperti penambahan jumlah tenaga terlatih serta partisipasi masyarakat yang bisa lebih maksimal lagi agar dapat mewujudkan Kota Mataram yang bersih dan berkelanjutan secara lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Manajemen Sampah, TPST Sandubaya.

Copyright (c) 2025 Nafillah, Muhammad Ali, Rahmad Hidayat



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International
License.

ABSTRACT

Mataram City Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Waste Management explains that the local government has the responsibility for sustainable waste management, starting from sorting at the source to the final process. This study aims to determine the extent to which the implementation of the waste management policy through the Sandubaya Integrated Waste Processing Site (TPST) can reduce waste volume in Mataram City, as well as to identify supporting and inhibiting factors in the process of implementing the policy. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation with the Environmental Agency, the Sandubaya TPST manager, and the surrounding community. The results of this study indicate that the Sandubaya TPST has been able to contribute to reducing waste volume through programs such as waste sorting, composting, maggot cultivation, and the manufacture of paving blocks from plastic waste. Therefore, the researchers concluded that this policy is already in place, but not yet optimally. However, its implementation still faces various obstacles, such as a lack of community participation and ongoing machine breakdowns that limit operational facilities. Supporting factors for success include the use of advanced technology at the Integrated Waste Processing Facility (TPST), the availability of a sufficient workforce, although the number is still not optimal, and strong support from the government and the community. Thus, waste management through this policy needs to be continuously optimized, such as by increasing the number of trained personnel and maximizing community participation to realize a clean and environmentally sustainable Mataram City.

Keywords: Implementation Policy, Waste Management, and Sandubaya TPST.

PENDAHULUAN

Di era urbanisasi yang pesat, banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Mataram, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Isu sampah kini menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi, terutama di kawasan pusat kota seperti pasar, terminal, dan jalan raya yang sering kali dipenuhi sampah. Permasalahan ini muncul akibat berbagai faktor yang saling terkait, seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, perkembangan ekonomi yang pesat, serta pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam (Kusdiah et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan sampah di berbagai daerah, yang memberikan gambaran penting mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani masalah ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Saebu Tri Suryo, 2021) tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tersebut masih kurang maksimal, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pembuangan sampah yang tidak terkendali. Penelitian ini juga mencatat bahwa kurangnya fasilitas yang

memadai menjadi hambatan besar dalam upaya pengelolaan sampah yang efektif.

Sementara itu, penelitian oleh (Rizky, 2022) di Kota Depok menunjukkan bahwa meskipun ada upaya sosialisasi yang cukup intensif kepada masyarakat, masih terdapat kendala dalam hal partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purwono et al., 2022) di Purwakarta juga mengungkapkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung, serta adanya kebutuhan untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Faktor-faktor tersebut memperburuk situasi pengelolaan sampah di perkotaan, mengingat meningkatnya kepadatan penduduk, peran kota yang terus berkembang, serta kompleksitas transportasi yang ada (Listantari et al., 2022). Berdasarkan penelitian (Kusdiah et al., 2024), pengelolaan sampah di kota besar juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang tidak selalu sesuai

dengan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya volume sampah dan keragaman komposisinya, pengelolaan sampah menjadi semakin kompleks. Terlebih lagi, dana yang terbatas untuk layanan publik dan dampak dari pembangunan ekonomi membuat penyelesaian masalah ini semakin sulit (Awaluddin & Hidayat, 2018). Keberadaan sampah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti tifus, diare, demam berdarah, serta penyakit lainnya yang dapat menular baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah ini semakin diperburuk oleh tingginya jumlah sampah yang terus bertambah, dengan komposisi yang semakin beragam, yang membutuhkan penanganan lebih serius dari pemerintah. Selain itu, kurangnya infrastruktur yang memadai dan adanya kekurangan dana membuat upaya pengelolaan sampah semakin rumit, yang pada gilirannya dapat mengancam kualitas hidup masyarakat (Mustamin et al., 2020).

Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghadapi tantangan yang sama. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan, masalah pengelolaan sampah

menjadi semakin mendesak. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, kota ini menghasilkan sekitar 400 ton sampah per hari, dengan sebagian besar berasal dari sektor rumah tangga, komersial, dan industri (Ummayya, 2023). Peningkatan volume sampah yang terus meningkat ini tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah di berbagai lokasi dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, serta meningkatkan risiko terjadinya penyakit. Lebih jauh lagi, saluran air yang tersumbat oleh sampah sering kali menjadi penyebab banjir di musim hujan, memperburuk dampak lingkungan yang sudah ada.

Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sampah ini, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pemisahan sampah sejak sumber, serta kampanye penyuluhan kepada masyarakat. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut telah dijalankan, masih terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Banyak warga yang masih memandang sampah

sebagai masalah yang hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka (Hidayat & Ferbiyanti, 2023). Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pengelolaan sampah yang ada. Di sisi lain, pengelolaan sampah yang ada saat ini cenderung berfokus pada tiga tahap dasar: pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Sayangnya, pendekatan ini sangat terbatas dan hanya memerlukan biaya yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya volume sampah. Tanpa adanya anggaran yang memadai, berbagai masalah operasional pun muncul, seperti fasilitas yang tidak memenuhi standar dan metode pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip teknis yang ada. Dampaknya, kualitas layanan pengelolaan sampah menjadi menurun, yang pada akhirnya mengabaikan perlindungan lingkungan yang seharusnya menjadi fokus utama.

Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kota Mataram tercatat mencapai 459.683 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 7.500 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Ampenan mencatatkan kepadatan penduduk tertinggi, yakni 9.305 jiwa per kilometer persegi, sementara Sekarbela memiliki kepadatan terendah, yakni 7.292 jiwa per

kilometer persegi (Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri). Angka kepadatan penduduk yang tinggi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan sampah, karena semakin banyaknya sampah yang dihasilkan setiap harinya. Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Mataram juga masih perlu diperbaiki. Sarana dan prasarana, seperti truk pengangkut sampah dan TPA yang memadai, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Terlebih lagi, anggaran yang terbatas untuk program pengelolaan sampah menjadi penghambat besar dalam

pelaksanaan kebijakan yang efektif. Selain masalah anggaran, koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pengelolaan sampah juga masih belum optimal, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program-program yang ada.

Tabel 1. Volume Sampah Harian di Kota Mataram Tahun 2024

Jenis Sampah	Volume Sampah (Ton/Hari)	Percentase Dari Total Sampah
Sampah organik	144	60%
Sampah plastik	72	30%
Sampah anorganik lainnya	24	10%
Total Sampah Harian Kota Mataram	240	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2025.

Berdasarkan tabel 1, total sampah harian di Kota Mataram pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 240 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sampah organik menyumbang sekitar 60% atau setara dengan 144 ton per hari, sampah plastik menyumbang sekitar 30% atau 72 ton per hari, dan sampah anorganik lainnya menyumbang sekitar 10% atau 24 ton per hari.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah merumuskan kebijakan Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta memberikan arah yang jelas untuk pengelolaan sampah di masa depan (Hidayat & Pratama, 2023).

Salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan memberikan insentif bagi masyarakat serta pelaku usaha yang aktif dalam program daur ulang. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat bisa lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan (Alqorni, 2019).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah di kota ini. Beberapa langkah yang telah diambil oleh DLH Kota Mataram adalah Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, Mataram Maggot Center, Sekolah Lisan (Lingkungan dengan Sampah Nihil), Program Pesona Harum (Pengelolaan Sampah Organik Andalan Hasilkan Rupiah Atasi Masalah, Pemisahan Sampah di Sumber, dan Kampanye Penyuluhan Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2024). Melalui langkah-langkah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram berusaha mengurangi sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menciptakan pengelolaan sampah yang

lebih efisien dan ramah lingkungan di Kota Mataram.

Sebagai langkah konkret dalam mengatasi masalah sampah, Pemerintah Kota Mataram juga telah membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya. Pembangunan TPST ini dimulai pada Oktober 2023 dan merupakan bagian dari program nasional untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di daerah dengan tingkat produksi sampah yang tinggi. Dengan anggaran sebesar Rp19,9 miliar dari pemerintah pusat, TPST Sandubaya dibangun di atas lahan seluas 5.300 meter persegi. Fasilitas ini dirancang untuk mengolah sampah dalam jumlah besar setiap harinya dengan teknologi tinggi, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. TPST Sandubaya diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang ada di Kota Mataram dan mengolahnya menjadi produk yang berguna (Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram).

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tempat pengolahan sampah terpadu di sandubaya yang telah dilaksanakan berhasil mengurangi volume sampah di kota mataram, serta untuk menggali berbagai faktor yang

mempengaruhi keberhasilan serta penghambat tempat pengolahan sampah terpadu di sandubaya dalam mengurangi volume sampah dikota mataram. Dalam konteks ini, evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana kebijakan ini berhasil diterapkan, serta apa saja hambatan yang muncul dalam proses implementasinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Edward III, yang menekankan empat faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur birokrasi.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, serta dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah Kota Mataram untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan pengelolaan sampah yang ada, sehingga tercipta lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan bagi seluruh warganya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti merasa perlu

untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambatnya, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki demi mencapai tujuan yang lebih optimal.

KAJIAN TEORI

Menurut Edward III, komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan bahwa pesan kebijakan dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Setyawan et al., 2021). Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur, juga menjadi faktor kunci dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Faktor perilaku, yang mencakup sikap dan kebiasaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah, juga memegang peranan penting, karena tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah sulit untuk terlaksana dengan baik. Terakhir, struktur birokrasi yang jelas dan efektif juga menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan kebijakan dapat berjalan dengan

lancar, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Implementasi Kebijakan Publik. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sandubaya, sebagai lokasi utama karena menjadi objek kajian dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung mulai dari bulan Mei sampai Juli 2025, mencakup observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumenter. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau (*in-depth interview*) dengan Kepala Dinas dan staf pada Dinas terkait serta beberapa masyarakat di Kota Mataram. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber kedua yang relevan dan membantu menjelaskan data primer (Hidayat, 2023). Data sekunder ini dapat diperoleh dari dokumen atau laporan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram yang menjadi objek penelitian.

Informan yang dipilih meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota

Mataram, petugas TPST Sandubaya, serta warga yang terdampak langsung dari kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, digunakan juga teknik snowball sampling untuk menjaring informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Peneliti melakukan observasi langsung untuk menilai kontribusi langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dalam mendukung kebijakan tentang pengelolaan sampah di kota mataram. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan wawancara, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak terstruktur. Informan yang akan diwawancara meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram beserta jajarannya, serta beberapa masyarakat di Kota Mataram. Metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan model analisis interaktif dari (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kota Mataram dan TPST Sandubaya

Kota Mataram adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Itu terletak di Pulau Lombok. Mataram adalah ibu kota Kabupaten Lombok Barat sebelum menjadi ibu kota provinsi. Sejarah Kota Mataram dimulai pada tahun 1958 ketika ditetapkan sebagai pusat

pemerintahan NTB setelah pemekaran wilayah di Indonesia. Kota Mataram kemudian berkembang pesat menjadi pusat ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan NTB. Tiga wilayah utama membentuk kota ini: Ampenan, yang dulunya merupakan pelabuhan penting dan sekarang menjadi pusat wisata. Kota Mataram yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan bisnis; dan Cakranegara, yang merupakan pusat perdagangan dan ekonomi utama. Tidak diragukan lagi, pertumbuhan pesat ini berkorelasi dengan masalah dalam mengelola berbagai bidang, seperti pengelolaan sampah yang semakin sulit seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi di kota ini.

Kota Mataram bertujuan untuk menjadi kota yang HARUM, yang berarti harmoni, aman, ramai, unggul, dan mandiri. Visi ini mencerminkan keinginan Kota Mataram untuk menjadi kota yang seimbang dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan utama visi ini adalah membuat masyarakat hidup dalam lingkungan yang nyaman, aman, dan berkualitas tinggi.

Misi Kota Mataram adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan fleksibel yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Ini juga akan meningkatkan kemandirian

ekonomi dengan meningkatkan daya saing daerah dan membuka peluang ekonomi baru. Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan transparansi dan partisipasi publik yang tinggi. Terakhir, untuk menjamin stabilitas sosial dan ekonomi di tengah perubahan lingkungan.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Mataram

Dalam upaya untuk membuat Mataram menjadi kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan, pengelolaan sampah telah menjadi fokus utama. Melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah Kota Mataram berusaha untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan efektif yang berbasis pada prinsip pengurangan, penggunaan, dan pengembalian (3R).

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Fasilitas ini mengolah sampah menjadi produk bernilai seperti magot, kompos, pupuk organik, dan bahan bakar sampah yang dihasilkan.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya dilakukan dengan berbagai program, antara lain pemilahan sampah di sumber, pengolahan sampah organik menjadi kompos, budidaya maggot untuk mengurangi sampah organik, serta pengolahan sampah plastik menjadi *paving block*. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program ini telah mampu mengurangi sebagian timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, ketersediaan sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi. Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian ini akan menganalisis menggunakan variabel dari Edward III, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pihak yang membuat kebijakan sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan dipahami dan diterapkan dengan baik. Kebijakan pengelolaan sampah Kota Mataram menuntut komunikasi yang jelas dan mudah dipahami agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah di rumah tangga. Menurut

Edward III (1980), komunikasi yang buruk akan menghambat pelaksanaan kebijakan, pernyataan ini sejalan (Amanda, 2020). Oleh karena itu, komunikasi yang lebih kreatif dan interaktif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut wawancara dengan Bapak Kamarudin, Koordinator Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyebarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah. Hal ini menjadi hambatan utama untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif.

Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat kurang menyadari dan memahami pentingnya pemilahan sampah. Sosialisasi yang lebih intensif diperlukan dan fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendukung penerapan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kebijakan berjalan dengan baik. Penyuluhan yang tidak menarik atau tidak diterima masyarakat dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan metode komunikasi yang lebih inovatif dan interaktif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi

aktif adalah penyuluhan yang melibatkan komunitas langsung.

Tabel 2. Program Sosialisasi Pengelolaan Sampah Oleh DLH Kota Mataram

Kegiatan	Target	Jalur Edukasi
Larangan penggunaan Plastik Sekali Pakai	Pasar tradisional	Langsung
Pelatihan Petugas Sampah	Pengolah sampah	Workshop/proyek
Kegiatan Zero Waste	Masyarakat NTB	Media langsung dan Media Sosial

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2025

Berikut dokumentasi kegiatan dilapangan terkait pelatihan di wokshop.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2024

Gambar 1. Workshop Pelatihan Petugas

Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menjalankan berbagai program sosialisasi pengelolaan sampah dengan pendekatan yang disesuaikan bersadarkan sasaran, sesuai tabel 2 dan gambar 1. Salah satu programnya adalah larangan penggunaan plastik sekali pakai untuk pasar tradisional dan swalayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram adalah efektivitas komunikasi. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan TPST

Sandubaya telah berupaya melakukan berbagai sosialisasi, seperti kampanye Zero Waste, pelatihan untuk petugas, serta pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, tingkat partisipasi masyarakat tetap rendah. Banyak penduduk belum terbiasa dalam memilah sampah karena informasi yang mereka terima dianggap kurang jelas, jarang disampaikan, dan tidak menarik. Selain itu, keterbatasan fasilitas, seperti tempat sampah terpisah di rumah, juga menjadi hambatan yang berarti.

2) Sumber Daya

Pilihan mempekerjakan Sebagian besar warga lokal berdasarkan pada beberapa alasan strategis dan sosial untuk memberdayakan Masyarakat setempat dan memberikan mereka kesempatan. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya mempekerjakan 54 orang untuk memilah sampah, 10 orang untuk membuat bata beton (paving block), dan 41 orang untuk budidaya maggot.

Tabel 3. Pekerja Lokal di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya

Jenis Pekerjaan	Jumlah Tenaga kerja	Tujuan Pemberdayaan
Memilah sampah	54 orang	-Menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar -Meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah berbasis komunitas
Membuat paving block	10 orang	-Mengembangkan keterampilan daur ulang sampah konstruksi -Menghasilkan produk bernilai ekonomi
Budidaya maggot	41 orang	-Memanfaatkan sampah organic sebagai pakan maggot -Mendukung ekonomi sekitar
Total	105 orang	-Memberdayakan masyarakat local sekaligus mengurangi pengangguran

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup
Kota Mataram, 2024.

Gambar 2. Proses Pemilahan Sampah

Tabel 3 merupakan aktivitas pelatihan yang ditawarkan oleh Bank Sampah ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya dan meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih efisien. Pelibatan masyarakat lokal meningkatkan ekonomi lokal

melalui penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya memiliki 105 pekerja, sebagian besar dari mereka yang tinggal di Kecamatan Sandubaya dan Cakranegara. Diharapkan perekonomian lokal akan meningkat sebagai hasil dari pemberdayaan masyarakat setempat yang didukung oleh kebijakan ini. Meskipun karyawan telah diberi pelatihan selama dua bulan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pemilahan sampah, Bapak Kamarudin menyatakan bahwa masih ada masalah dalam pengelolaan sampah, yang memerlukan lebih banyak karyawan yang berpengalaman.

Meskipun tidak terdapat standar nasional yang mengatur jumlah personel ideal bagi TPST, praktik penentuan jumlah petugas sebaiknya dilakukan

melalui pendekatan context-based. Penetapan ini berlandaskan analisis operasional, termasuk arah pengolahan sampah (kompos, maggot, paving block) serta volume per hari (40–46 ton). Oleh karena itu, jumlah personel saat ini (105 petugas) dapat dikategorikan sebagai bentuk respons kesiapan sumber daya, tapi masih perlu dikaji lebih dalam. Idealnya, DLH harus melakukan perhitungan kebutuhan SDM berbasis beban kerja, jumlah shift, lokasi, dan target output agar implementasi kebijakan lebih efektif (Widigdo, 2023).

Dalam studi yang dilakukan di Kabupaten Lamongan (Fitroni, 2018), sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan limbah terdiri dari dua institusi utama, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Meskipun jumlah SDM mencukupi, penelitian ini mendapati adanya masalah seperti kurangnya kompetensi teknis serta pergantian posisi yang mengganggu efisiensi kerja (Fitroni, 2018). Ini berbeda dengan yang terjadi di TPST Sandubaya, di mana para pegawai menerima pelatihan intensif selama dua bulan yang diselenggarakan oleh Bank Sampah dan DLH Kota Mataram. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam

pemisahan limbah, budidaya maggot, dan pembuatan paving blok, sehingga menghasilkan SDM yang lebih terampil dan siap untuk bekerja (Wawancara Kamarudin, 2025).

Selanjutnya, penelitian di Lamongan juga menunjukkan kurangnya kolaborasi antara instansi yang terlibat, yang berakibat pada tumpang tindih tugas dan lemahnya koordinasi. Sebaliknya, di TPST Sandubaya, kerja sama antara DLH Kota Mataram dengan Bank Sampah lokal berjalan dengan efektif, yang memungkinkan pelatihan serta penerapan kebijakan dilakukan secara sinergis. Pendekatan pemberdayaan komunitas lokal di TPST Sandubaya juga memberikan keuntungan tersendiri, di mana 90% tenaga kerjanya berasal dari warga setempat, sehingga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Wawancara Kamarudin, 2025).

a) Sumberdaya Anggaran

Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya didanai oleh pemerintah pusat sebesar Rp19,9 miliar. Anggaran tahunan untuk operasional dan pemeliharaan juga diperlukan untuk menjamin kelangsungan operasional.

Bapak Kamarudin menyatakan bahwa meskipun maggot yang dibuat

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya sudah mulai dijual, mereka masih membutuhkan anggaran untuk memastikan operasi dan pemeliharaan fasilitas tetap berjalan. Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah di TPST, anggaran yang memadai sangat diperlukan (Mahmuda et al., 2022). Tanpa dana yang cukup, pengelolaan fasilitas pengolahan sampah akan terganggu, yang berisiko menurunkan efektivitas kebijakan.

Studi di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa kurangnya dana untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi hambatan utama dalam pengelolaan limbah. Anggaran yang terbatas mengakibatkan fasilitas pengelolaan limbah yang tidak memadai, terutama di area pedesaan (Fitroni, 2018). Di sisi lain, TPST Sandubaya menerima dana pembangunan sebesar Rp19,9 miliar dari pemerintah pusat, yang memungkinkan pembangunan infrastruktur modern dan berkesinambungan. Namun, kendala yang serupa muncul dalam aspek dana operasional dan pemeliharaan, di mana TPST Sandubaya masih memerlukan tambahan dana untuk memastikan kelangsungan operasional (Wawancara Kamarudin, 2025).

b) Sumberdaya Peralatan

Setyawan et al. (2021) mengutip Edward III (1980) menyatakan bahwa peralatan yang memadai adalah sumber daya penting dalam implementasi kebijakan. Penggunaan peralatan yang tepat dan modern meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat proses pengelolaan sampah. Berbagai peralatan modern dilengkapi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya untuk membantu proses pengolahan sampah.

Peralatan juga berkontribusi pada pengurangan jumlah sampah yang akhirnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir dan memungkinkan Pengolahan Sampah menjadi produk bernilai seperti paving block dan maggot, yang tentunya bermanfaat bagi lingkungan.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 3. Mesin Pengepres Sampah

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sandubaya memiliki budidaya

maggot yang berhasil. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya memiliki Peralatan modern seperti mesin penarik logam, mesin gibrig, mesin sentris, mesin pencetak paving, mesin pengancur kaca, mesin pengepres, mesin pengering dan pengayak memungkinkan pengelolaan sampah yang lebih terorganisir dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Kurniyawan & Putri, 2023). Tempat Pengolahan Sampah Terpadu(TPST) Sandubaya juga telah menghasilkan 20 ton maggot dalam waktu lima bulan. Maggot ini digunakan untuk pakan ikan dan ternak serta sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik. Pencapaian ini tentunya didukung oleh peralatan yang memadai.

Ketersediaan peralatan modern merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan limbah. Dalam Kabupaten Lamongan, penelitian turut menemukan kurangnya fasilitas seperti mesin pengolah limbah, yang mengakibatkan proses daur ulang dan pengurangan limbah menjadi tidak maksimal (Fitroni, 2018). Sementara itu, TPST Sandubaya dilengkapi oleh beragam mesin mutakhir, seperti mesin penarik logam, mesin pemilah sampah otomatis (MPPS), mesin pencetak paving, dan mesin penghancur kaca. Peralatan ini

tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti paving block dan maggot (Wawancara Kamarudin, 2025). Keberhasilan ini sejalan dengan pandangan Edward III (1980) yang menekankan pentingnya fasilitas yang memadai untuk mendukung penerapan kebijakan.

Disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia terlatih, anggaran yang cukup, dan peralatan modern. TPST Sandubaya menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal tersebut, berkat pelatihan SDM, dana pembangunan yang memadai, serta fasilitas canggih. Sementara itu, Kabupaten Lamongan masih menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pelajaran dari TPST Sandubaya dapat dijadikan pedoman bagi daerah lain untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah melalui pendekatan yang terpadu dan pemanfaatan teknologi.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan sikap, kemauan, dan komitmen dari para pelaksana maupun penerima kebijakan

dalam mendukung implementasi. Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana para aktor memiliki sikap positif terhadap kebijakan yang dijalankan. Bapak M. Ilman Kurniawan selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menekankan bahwa kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah adalah bagian penting dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Muslihatun, selaku warga yang tinggal di sekitar TPST Sandubaya, ia menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai pemilahan sampah masih kurang menyeluruh sehingga banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah sejak dari rumah. Selain itu, masyarakat masih sering beranggapan bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi komunikasi dan disposisi masyarakat, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan, meskipun pelaksana kebijakan telah berupaya melakukan sosialisasi.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan disposisi antara pelaksana kebijakan (DLH dan pengelola TPST) dengan penerima kebijakan (masyarakat). Jika disposisi pelaksana relatif positif dan berkomitmen, maka disposisi masyarakat justru masih rendah, ditandai dengan sikap enggan, malas, atau tidak terbiasa memilah sampah.

Dengan demikian, sesuai dengan model Edward III, implementasi kebijakan menjadi kurang efektif karena adanya ketidakseimbangan disposisi antara pelaksana dan penerima kebijakan. Jika disposisi masyarakat dapat ditingkatkan, maka kebijakan pengelolaan sampah akan berjalan lebih optimal.

4) Struktur Birokrasi

Pemerintah Kota Mataram adalah posisi tertinggi dalam struktur birokrasi. Perencanaan dan kebijakan pengelolaan sampah di Mataram dilakukan oleh pemerintah kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram (DLH) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini. Tanggung jawabnya mencakup penyusunan kebijakan dan regulasi, pengagihan anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Unit yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.

Struktur internal Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Tim Umum dan Kepegawaian, yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia dan koordinasi antar bidang. Tim Pengelolaan Sampah, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan operasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya dan sistem pengelolaan sampah Mataram, dan Divisi Monitoring dan Evaluasi, yang bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan pengelolaan sampah dan melakukan evaluasi program secara berkala.

Koordinator Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya bertanggung jawab atas operasional harian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, termasuk pengolahan sampah, manajemen tim, dan pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup. Tanggung jawabnya meliputi pengelolaan fasilitas pengolahan sampah, pemilahan sampah organik dan non-organik, pengawasan pelaksanaan program pelatihan karyawan, dan penyusunan laporan operasional dan perkembangan untuk disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas dan peralatan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan standar.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya memiliki tiga tim utama yang bertanggung jawab atas operasional pengelolaan sampah. Tim pemilahan sampah memiliki tugas memilah sampah organik dan non-organik dari masyarakat. Tim ini terdiri dari 54 orang, dengan beberapa shift pemilahan manual dan mesin. Tim Pembuat paving block ada 8 orang bekerja dalam dua shift dan bertugas mengolah sampah plastik menjadi paving block, yang dapat digunakan untuk pembangunan. Tim Budidaya Maggot ada 20 orang bekerja dan bertugas mengolah sampah organik menjadi maggot, yang kemudian digunakan untuk pakan ternak dan bahan baku pupuk organik.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya memberikan pelatihan kepada masyarakat dan karyawan mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduksi, Penggunaan, dan Recycle). Keterlibatan Bank Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup: Karyawan TPST mendapatkan pelatihan dua bulan dari Bank Sampah dan DLH untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka.

3. Faktor Keberhasilan Dan Penghambat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sandubaya Dalam Mengurangi Volume Sampah di Kota Mataram

Faktor keberhasilan dan penghambat adalah dua komponen utama yang sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram, khususnya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya. Faktor-faktor ini tidak hanya saling terkait, tetapi juga penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini dapat mencapai tujuannya, yaitu mengurangi volume sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Berikut penulis jelaskan mengenai faktor Keberhasilan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota Mataram.

Penggunaan teknologi canggih di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya adalah komponen penting dari keberhasilan. Mesin modern yang digunakan di TPST, seperti mesin penggiling, mesin pencetak paving, dan mesin pengering, membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dan mengubahnya menjadi barang berharga seperti paving block (lihat gambar 4), kompos, maggot dan RDF.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 4. *Paving Block* Dari Sampah Plastik

Penelitian Oleh (Fitroni, 2018) mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan, komitmen dari pelaksana kebijakan juga merupakan elemen penting, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Di Lamongan, dukungan dari Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup tampak jelas dengan inisiatif mereka dalam merancang program seperti Lamongan Green and Clean (LGC). Namun, kurangnya kerja sama antara kedua instansi itu menjadi penghambat dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, di TPST Sandubaya, dukungan yang kuat dari pihak pemerintah dan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak M. Ilman Kurniawan serta Bapak Johri, menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan. Ini menunjukkan bahwa dukungan tidak hanya harus berasal dari pihak pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Kerusakan mesin yang sering terjadi menyebabkan proses pengolahan sampah menjadi kurang efisien. Mesin yang macet atau tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan pemilahan sampah tertunda, yang pada gilirannya menghambat proses pengolahan sampah lebih lanjut, seperti pembuatan pupuk organik, kompos, dan produk lainnya (Nugraha et al., 2020). Hal ini menyebabkan TPST Sandubaya tidak dapat mengolah sampah secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Upaya pemeliharaan rutin setiap tiga bulan menunjukkan komitmen Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya untuk memastikan bahwa mesin yang digunakan tetap berfungsi dengan baik, meskipun mesin sering mengalami kerusakan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya terus memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengolahan sampah, meskipun menghadapi berbagai kendala teknis. Mesin canggih seperti mesin pengancur kaca, mesin pengepres, dan mesin pengering mengubah sampah menjadi produk bermanfaat seperti kompos, bata beton, dan bahan bakar sampah (Pujiyanto, 2024). Selain itu, fasilitas budidaya maggot berhasil menghasilkan 20 ton maggot dalam waktu

lima bulan, yang dapat digunakan untuk pakan ternak dan pupuk organik. Teknologi ini menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Meskipun teknologi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya sangat membantu dalam pengelolaan sampah, masalah teknis merupakan faktor utama yang menyebabkan penghambat kebijakan ini. Menurut Bapak Johri, karyawan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, mesin pemilah sampah sering mengalami kerusakan atau macet, terutama ketika sampah yang masuk tidak dipilah dengan baik atau ketika material yang sulit diproses seperti plastik keras dan sampah basah. Kendala teknis ini menyebabkan proses pemilahan sampah menjadi lambat dan mengganggu proses pengolahan sampah lebih lanjut, seperti membuat kompos atau Paving Block.

Secara keseluruhan, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam menjelaskan kompleksitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah. Penelitian (Fitroni, 2018) memberikan perspektif makro mengenai perlunya kolaborasi antar-instansi serta penyediaan infrastruktur dasar, sementara penelitian di Mataram menawarkan analisis mikro tentang operasional fasilitas pengelolaan

limbah dan hubungan dengan masyarakat. Gabungan temuan dari kedua studi ini bisa menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih menyeluruh, termasuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi anggaran, serta merancang program sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya di Kota Mataram telah efektif mengurangi volume sampah dan menghasilkan produk bernilai seperti maggot, kompos, paving block, dan bahan bakar pembangkit listrik tenaga sampah. Namun, implementasi kebijakan ini terhambat oleh partisipasi masyarakat yang belum maksimal, masih terjadi kerusakan mesin. Sedangkan faktor pendukungnya adalah Penggunaan teknologi canggih di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), tersedianya tenaga kerja terlatih meskipun jumlahnya masih belum optimal, serta dukungan yang kuat dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk berkomitmen mewujudkan kota Mataram yang bersih dan religius.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqorni, W. (2019). Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pasie Nan Tigo. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i1.712>
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*.
- Awaluddin, M., & Hidayat, R. (2018). Kerusakan Lingkungan dalam Kegiatan Peningkatan Produktivitas Manusia Sebagai Tantangan Pemerintah Daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*.
- Fitroni, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan. In *Universitas Brawijaya*.
- Hidayat, R. (2023). Analisa Penerapan Sistem Merit Di Pemerintah Kota Mataram (Studi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2022). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v9i2.603>
- Hidayat, R., & Ferbiyanti, I. (2023). Pelayanan Publik di Kota Mataram: Program Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.3086>
- Hidayat, R., & Pratama, I. N. (2023). Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Menjaga Destinasi Wisata Pantai Loang Baloq. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v6i3.2474>
- Kurniyawan, A., & Putri, M. A. (2023). Strategi Kebijakan Pengelolaan

- Sampah Terpadu Berbasis Modernisasi Di Ikn. *STANDAR: Better Standard Better Living*.
- Kusdiah, Y., Sriwati, M., Kasnawati, & Sampe, R. (2024). Peran Pendidikan Lingkungan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*.
- Listantari, L., Gusleni, Y., Soemardjito, J., & Purwoto, H. (2022). Strategi Peningkatan Pelayanan Transportasi Antarmoda Terpadu di Kota Palembang. *Jurnal Transportasi Multimoda*. <https://doi.org/10.25104/mtm.v19i2.2035>
- Mahmuda, D., Saputra, R., & Nurrahman, A. (2022). Kompetensi Aparatur Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i1.2418>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Miles and Huberman 1994.pdf. In *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Mustamin, M., Hidayat, R., & Alfian, Y. (2020). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemulihan Pembangunan Fisik Pasca Gempa (Studi Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2794>
- Nugraha, N., Pratama, D. S., Sopian, S., & Roberto, N. (2020). Rancang Bangun Mesin Pencacah Sampah Organik Rumah Tangga. *Jurnal Rekayasa Hijau*. <https://doi.org/10.26760/jrh.v3i3.3428>
- Pujiyanto, R. (2024). Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Menyejahterakan Masyarakat Di Kelurahan Blotongan Kota Salatiga. *Edusight Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.69726/edujpm.v1i1.4>
- Purwono, P., Rabiatul, W., & Suyanto, E. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Model Sirkular di Wilayah Perkotaan Purwokerto Household Waste Management Strategy with Circular Model in Purwokerto. *Buletin Keslingmas*.
- Rizky, A. A. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok Dalam Pengelolaan Sampah. In *repository Universitas Hasanuddin*.
- Saebu Tri Suryo. (2021). Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Rumbai Pesisir). *Skripsi*.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward Iii Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774>
- Ummayya, N. E. (2023). Optimalisasi pengelolaan persampahan di kota mataram. *Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir 2023*.
- Widigdo, A. M. N. (2023). Literasi Manajemen SDM Untuk Keberlangsungan Bank Sampah Di Kelurahan Joglo, Jakarta Barat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.